

RESISTENSI TERHADAP DELEGITIMASI KEKUASAAN ORDE BARU DALAM ANTOLOGI PUISI *NYANYIAN AKAR RUMPUT* KARYA WIJI THUKUL

Achmad Naufal Irsyadi

Program Studi Magister Ilmu Linguistik
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Jember
Surel: naufalirsyadiachmad@gmail.com

Novi Anoegrajekti

Dosen Program Studi Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Jember

Dina Dyah Kusumayanti

Dosen Program Studi Sastra Inggris
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Jember

Abstract. This study observed the form and mechanism of power of the New Order in Wiji Thukul's poem to discover theoretical and factual novelty. This study applied sociology of literature as an approach to gain a strengthening basis about the relationship between Wiji Thukul's poem and social context during the New Order. The theory of Power by Michel Foucault was used to overview and highlight the form and mechanism of power of The New Order, so that the model of the analysis was analytical descriptive. The object of this study was the anthology of Wiji Thukul's poem *Nyanyian Akar Rumput*. Based on the analysis, there found that the New Order was an authoritative, repressive, and oppressive government. His power performed through the relation of power and dominant discourse that were spread and legitimated through power networking established by the New Order. This characteristics of power had made Wiji Thukul consistently sacrificed and struggled to conduct a resistance by media of poem. From this study, there could be concluded that Wiji Thukul's poem was fully loaded with intense and dominant sociological outlook.

Kata Kunci: *Sosiologi Sastra, Michel Foucault, Teori Kekuasaan, Orde Baru, Wiji Thukul*

PENDAHULUAN

Orde Baru lahir dari sebuah mekanisme politik yang dibangun oleh para praktisi Orde Baru. Tercatat bahwa Orde Baru memimpin pemerintahan Indonesia dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun lamanya. Sistem politik yang dijalankan oleh rezim Orde Baru terbukti sukses mempertahankan gerak perpolitikan Orde Baru. Soeharto sebagai penggagas dan sekaligus pemimpin pada masa Orde Baru telah berhasil memperkokoh kekuasaannya serta mempertahankan legitimasi rakyat terhadap pemerintahannya yang berlangsung hingga 21 Mei 1998. Rezim Soeharto (yang lebih dikenal dengan rezim Orde Baru) menggunakan dua cara untuk menyingkirkan dan memperlemah lawan politiknya. Kedua cara tersebut adalah Manifes dan Laten-simbolik (Sudibyo, 1998).

Manifes merupakan cara-cara yang dioperasikan melalui mekanisme legal-formal, piranti-piranti hukum yang manipulatif dan koptatif, serta represi-represi fisik yang prosedural. Jalur manifes dapat dilihat melalui fenomena dunia pers, gerakan buruh, dan kelompok mahasiswa ataupun intelektual yang dikontrol dengan rekayasa-rekayasa perangkat hukum, represi fisik, dan intimidasi psikologis. Sebagai sebuah akibat dari perlawanan yang dilakukan oleh beberapa pihak dan kritikus, rezim Soeharto melakukan perlawanan pula dalam bentuk memenjarakan, menculik dan bahkan melenyapkan sejumlah aktivis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah di kala itu.

Cara yang kedua adalah cara yang lebih bersifat laten-simbolik. Dalam cara yang kedua ini, rezim Soeharto melakukan praktik delegitimasi terhadap lawan politiknya dengan cara memproduksi dan memanipulasi wacana-wacana resmi yang kemudian digunakan sebagai sarana produksi kebenaran versi negara. Produksi wacana-wacana tersebut dapat terlihat dalam buku teks

pendidikan, surat kabar, majalah, jurnal, buku putih, dan film-film yang diproduksi dan dirangcang oleh pemerintah. Secara tidak langsung, jenis kebenaran yang dijalankan oleh rezim Orde Baru, yaitu: 1) kebenaran sebagai objek dari distribusi dan konsumsi yang besar-besaran melalui aparat pendidikan dan informasi yang menyebar luas; 2) kebenaran diproduksi dan disebarluaskan di bawah pengawasan segelintir apparatus ekonomi dan politik dominan; dan 3) kebenaran juga merupakan sasaran dari serangkaian perdebatan politik dan konfrontasi sosial (Sudibyo, 1998).

Wacana kebenaran tentang rezim Orde Baru dan lawan politiknya kian menyebar menjadi sebuah delegitimasi. Kebenaran versi Negara dalam konteks legitimasi-delegitimasi terangkum dalam praktik penggambaran diri negara secara positif (*positive self-presentation*) dan praktik penggambaran pihak lain (lawan negara) secara negatif (*negative other-presentation*) (Sudibyo, 1998).

Legitimasi dan delegitimasi mengarahkan pembacaan publik bahwa Orde Baru merupakan masa keemasan dan berkesejahteraan. Untuk melancarkan proses legitimasi dan delegitimasi wacana kepada publik, Orde Baru menggunakan domain simbolik yang berupa kontrol terhadap makna dan pikiran partisipan wacana. Wacana dikontrol melalui relasi kuasa yang saling terjalin dan saling menguatkan. Kontrol tersebut dilindungi oleh pihak militer, sehingga siapa pun yang mencoba untuk memberikan sebuah kritik dan melakukan sebuah perlawanan atas kebijakan yang sedang berlangsung, maka ia akan menghadapi aparat militer dengan segenap konsekuensi hukum yang akan menjeratnya. Hal ini yang disebut Michel Foucault sebagai sebuah jejaring kuasa untuk mendisiplinkan lawan dan public atas kebijakan yang sedang diterapkan (Kebung, 2016).

Studi ini mengkaji praktik kekuasaan Orde Baru dalam karya puisi Wiji Thukul dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Konteks yang terkandung dalam puisi Wiji Thukul sarat akan makna dan pendeskripsian yang nyata mengenai Orde Baru. Legitimasi dan delegitimasi wacana melalui peran bahasa sebagai salah satu media wacana merupakan potret politis antara Orde Baru dan para aktivis HAM pada saat itu. Hal tersebut menjadi dasar untuk mengkaji potret tersebut menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang melibatkan teori kekuasaan Michel Foucault. Meskipun penelitian teoretis dan analitis mengenai Orde Baru telah banyak dilakukan, namun pengaplikasian teori kekuasaan Michel Foucault terhadap kekuasaan Orde Baru belum dilakukan secara komprehensif.

METODE PENYAJIAN

Studi ini mengkaji praktik kekuasaan Orde Baru dalam karya puisi Wiji Thukul dengan melibatkan teori kekuasaan Michel Foucault dalam bingkai sosiologi sastra. Secara umum, sosiologi sastra meneliti aspek sosiologis dalam karya sastra untuk menemukan fakta-fakta sosial yang terjadi dalam suatu konteks zaman. Landasan digunakannya sosiologi sastra sebagai sebuah pendekatan adalah sastra tidak terlahir dari sebuah kekosongan budaya (Pradopo, 2007). Budaya merupakan salah satu wilayah dalam studi ilmu sosial selain ilmu-ilmu sosial itu sendiri, sehingga penting untuk menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk membedah karya sastra untuk menemukan relevansi konteks waktu yang terkandung dalam karya sastra.

Dengan demikian, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis objek penelitian, antara lain:

1. Membaca puisi-puisi Wiji Thukul dalam antologi puisi *Nyanyian Akar Rumput*;
2. Mengidentifikasi bentuk dan mekanisme kekuasaan pemerintahan Orde Baru dalam antologi puisi *Nyanyian Akar Rumput*;
3. Melakukan analisis terhadap bentuk dan mekanisme kekuasaan Orde Baru dengan menggunakan teori Kekuasaan Michel Foucault.
4. Membuat simpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orde Baru Kapitalis? Bentuk Doktrin dan Diskriminasi Ekonomi terhadap Ekonomi Kerakyatan melalui Kasus Penanaman Modal Asing (PMA)

Jika dilihat dari sisi sejarahnya, Orde Baru muncul dan berdiri sebagai sebuah masa peralihan yang akan mengantarkan Indonesia dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera dengan taraf ekonomi yang stabil dan terus berkembang. Akan tetapi, pembangunan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru tidak selalu berjalan efektif dan mutual, terutama terhadap masyarakat Indonesia. Asas pembangunan ekonomi nasional mengalami pergeseran makna. Terhitung sejak pertengahan 1980-an, terjadi pergeseran peranan ekonomi antara pemerintah dan swasta. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi kerakyatan. Dinamika tersebut tidak lepas dari politik ekonomi nasional yang mengguncang ekonomi Indonesia di awal 1980-an (Syahrie, 2009).

Chaniago menyebutkan bahwa prinsip ekonomi pembangunan yang pada mulanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia kini berubah menjadi pembangunan untuk meningkatkan

pendapatan pemerintah (Syahrie, 2009). Secara tidak langsung, kecenderungan yang tidak menempatkan masyarakat sebagai sasaran pembangunan ekonomi nasional dan sumber tumbuh-kembangnya ekonomi nasional melalui sektor sumber daya alam masyarakat Indonesia membuat posisi masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi lemah, terlebih ketika mereka harus dihadapkan pada para pemodal asing yang memiliki modal yang lebih banyak dari mereka. Oleh karena itu, dalam konteks ini, peranan swasta sebagai penggerak ekonomi nasional tidak lagi diperhitungkan.

Lebih lanjut, dampak dari pergeseran dan dinamika praktis pembangunan ekonomi nasional di atas adalah sempitnya ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional yang dilakukan secara pribadi (Syahrie, 2009). Masyarakat tidak memiliki gerak untuk memperjuangkan roda ekonomi kehidupannya dengan menginvestasikan dan meniadakan sesuatu di daerahnya. Akibatnya, penggusuran dan pengusiran pedagang kaki lima dan penggusuran tempat tinggal masyarakat pinggiran kota sering ditemukan pada masa Orde Baru. Hal tersebut dapat diketahui melalui puisi Wiji Thukul yang berjudul *Nyanyian Akar Rumput*;

Jalan raya dilebarkan
Kami terusir
Mendirikan kampung
Digusur
Kami pindah-pindah
Menempel di tembok-tembok
Dicabut
Terbuang
Kami rumput
Butuh tanah

(“Nyanyian Akar Rumput”, 25:1-10)

Keikutsertaan pemodal asing dalam proses pembangunan ekonomi nasional Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru merupakan sebuah legitimasi kebenaran yang dilakukan secara terstruktur dan terencana. Dalam sudut pandang Michel Foucault, hubungan antara pemerintahan Orde Baru dengan pemodal asing sebagai mitra investasi dalam rangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu mekanisme relasi kekuasaan yang dibangun secara utuh dan tersistem.

Stabilitas ekonomi Indonesia melalui program Penanaman Modal Asing (PMA) menguntungkan pemerintah dan menegasikan kesempatan dan peluang masyarakat Indonesia (dari kalangan menengah ke bawah) untuk membuka unit usaha dan melakukan gerakan ekonomi bagi kehidupannya. Dampak positif yang diperoleh oleh pemerintah Orde Baru atas terselenggaranya kerjasama transnational dan internasional dengan beberapa investor asing tidak bertahan lama. Besarnya profit yang diperoleh negara dari para investor asing nyatanya memicu tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh elit pemerintah pada saat itu.

Dikarenakan fenomena tersebut, perekonomian Indonesia lambat laun menjadi tidak stabil dan pada akhirnya harus menghadapi krisis moneter. Maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintahan pada saat itu mengganggu stabilitas dan jalannya kerjasama transnasional dan internasional dalam bidang ekonomi. Fenomena tersebut rupanya berdampak negatif terhadap jumlah investasi yang diperoleh pemerintah Orde Baru dan mengantarkan perekonomian Indonesia menuju fase krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 (Dona, 2017). Pada

akhirnya, perlawanan dan kritik terhadap pemerintah mulai bergejolak ketika pemerintah Orde Baru gagal menstabilkan perekonomian Indonesia yang berkerakyatan.

Orde Baru dan *Security Approach*: Melihat Prinsip Kekuasaan Michel Foucault dalam Kepemimpinan Orde Baru

Dalam menjalankan pemerintahannya, Orde Baru tidak hanya didukung oleh para pemodal dan para elit politik baik dalam ranah ekonomi maupun ranah politik, akan tetapi juga didukung dan dilindungi oleh mekanisme pertahanan dan perlindungan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Secara umum, kemerdekaan sebuah negara dan bangsa banyak didapatkan melalui peranan militer. Keterlibatan militer dalam suatu pemerintahan memiliki fondasi sejarah yang begitu baku. Faktor kemerdekaan Indonesia menjadi awal keterlibatan militer dalam politik (Leni, 2013). Mereka mengadakan perundingan dan musyawarah dalam memerangi dan melawan penjajah Belanda pada saat itu. Secara tidak langsung, mereka membentuk diri mereka sebagai seorang pejuang, pelindung, dan penguat dari sebuah negara.

Selama 5 tahun revolusi Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1949, peranan militer dalam pertahanan negara dan bangsa sangat terlihat secara jelas. Militer dan politik merupakan dualisme kepemimpinan dan citra militer pada saat itu, sehingga pada masa Orde Baru dualisme militer begitu diakui kebenarannya (Leni, 2013). Pada masa Orde Baru, militer tidak hanya terlibat dalam sistem politik dalam pemerintahan Indonesia, melainkan juga terikat bersama dengan kekuatan sosial-politik lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa fakta keterlibatan dan keterikatan militer pada masa Orde Baru yang di antaranya adalah (Leni, 2013):

- a) Berperan sebagai pilar Orde Baru;
- b) Berperan sebagai stabilisator dan dinamisator;
- c) Berpartisipasi dalam lembaga legislatif dan eksekutif;
- d) Mendapatkan peluang untuk berbisnis bagi keluarga TNI;
- e) Menjalankan fungsi modernisasi dengan program AMD (ABRI Masuk Desa) di daerah-daerah tertinggal.

Konkretisasi dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru menjadi sesuatu yang kukuh. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan militer dalam mengendalikan kekuasaan yang sedang berlangsung. Secara tidak langsung, mereka menolak pandangan yang menyatakan bahwa militer harus menjaga jarak dari lingkungan politik pemerintahan. Sejak itu, dwifungsi dikembangkan menjadi beberapa asumsi dasar sebagai pembenaran terhadap peran militer dalam politik dan pemerintahan Indonesia, khususnya Orde Baru (Leni, 2013). Beberapa pengembangan dwifungsi tersebut antara lain:

- a) Nilai kesejarahan
Dalam hal ini, militer Indonesia digambarkan sebagai sebuah institusi yang memiliki sejarah sendiri dalam menghadapi perlawanan militer asing.
- b) Pengamanan dan perlindungan terhadap ideologi negara

Dalam hal ini, militer Indonesia memiliki tanggung jawab mengamankan Pancasila sebagai ideologi negara.

- c) Pembentukan negara
Dalam hal ini, militer Indonesia memiliki peran dalam membentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang diatur dalam sebuah sistem kekeluargaan.

Berdasarkan sejarahnya, dwifungsi ABRI yang diterapkan pada masa Orde Baru merupakan sebuah jalan tengah sebuah pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya dan menghadapi segala tantangan yang ada. Konsep dwifungsi ABRI berasal dari konsep jalan tengah yang digagas oleh A.H. Nasution. Lebih lanjutnya, konsep jalan tengah merupakan sebuah konsep yang menginginkan militer tidak hanya berperan dalam pertahanan dan keamanan negara (Firdaus, 2017). Selain itu, konsep jalan tengah juga dapat menjalankan fungsi sosial-politik ABRI untuk ikut serta menentukan kebijakan politik negara yang dijalankan oleh pemerintah (Herdiansah, dkk, 2017).

Dalam kenyataannya, konsep jalan tengah sebagai landasan dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru semakin mempermudah keberlangsungan kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru melalui kebijakan-kebijakannya dalam berbagai bidang. Secara tidak langsung, pemerintah Orde Baru menggunakan azas dwifungsi ABRI ini sebagai media perlingkungannya dari berbagai ancaman dan tantangan yang ada. Pembuat kebijakan (*decision maker*) menginginkan sebuah pengamanan yang maksimal ketika ia hendak membuat suatu keputusan dan kebijakan (Verendel, 2008). Pengamanan tersebut diperolehnya dari militer sebagai kontrol keamanan yang dimiliki oleh Orde Baru pada masa itu.

Dengan model pengamanan dan perlindungan terhadap pemerintahan Orde Baru, kalangan oposisi yang menentang pemerintahan Orde Baru secara tidak langsung akan berpikir bahwa tindakan mereka akan menjadi sia-sia. Di sisi lain, mereka akan merasa diawasi di manapun mereka berada. Hal ini yang disebut sebagai konsep *Security Approach* yang diterapkan oleh

Orde Baru melalui dwifungsi ABRI. Tentunya, hal tersebut akan membuat pihak oposisi akan merasa diawasi dan tidak aman, bahkan mereka akan merasa tidak aman ketika mereka aman. Hal tersebut sesuai dengan pendapat sebagai berikut:

“Assuming that people act on perceived rather than actual risks, we will sometimes do things we should avoid, and sometimes fail to act like we should. In security, people may both feel secure when they are not, and feel insecure when they are actually secure”. (Verendel, 2008)

Keberadaan ABRI dengan legalitas dwifungsinya dalam kegiatan perpolitikan di Indonesia semakin memperkuat kekuasaan Orde Baru yang berlangsung pada saat itu. Berbagai tindakan represif diciptakan ketika ada pihak yang mencoba untuk melawan pemerintahan Orde Baru melalui kebijakannya. Konsep *Security Approach* yang digunakan oleh Orde Baru sukses menciptakan ketakutan dan ketundukan pada kekuasaannya, meskipun masih ada pihak-pihak yang mencoba untuk melawan.

Mekanisme kekuasaan yang dijalankan oleh Orde Baru menuai dampak negatif bagi beberapa kalangan, terutama masyarakat kecil, kaum marjinal, dan buruh. Pembangunan ekonomi menuju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional menjadi sebuah keniscayaan bagi rakyat kecil yang ditandai dengan munculnya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998. Selain itu, kode etik ekonomi yang dibuat oleh perusahaan pada masa Orde Baru dalam rangka menetapkan standarisasi dan perlindungan kepada para buruh dan para pekerja tidak berlaku, karena pemerintah Orde Baru rupanya mensosialisasikan murahannya harga buruh di Indonesia untuk menarik minat dan ketertarikan para investor

asing untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Dengan kondisi semacam itu, maka kode etik yang melindungi buruh dan rakyat kecil tidak bermanfaat dan tidak mengubah apapun dalam kehidupan mereka (Gainau, 2017).

Dikarenakan iklim sosial semacam itu, maka pada tahun 1998, pemerintahan Orde Baru runtuh. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru disebabkan oleh desakan dan kritik yang mewarnai pemerintah pada saat itu. Munculnya krisis moneter, diskriminasi terhadap kaum buruh dan masyarakat kecil, keterbatasan Pers, represi para aparat militer, dan permasalahan sosial lainnya menjadi modal dan bekal faktual bagi para aktivis dan demonstran untuk melakukan aksi protes terhadap Orde Baru yang mengakibatkan pemimpin Orde Baru presiden Soeharto harus mengundurkan diri.

Impian Orde Baru dalam mengantarkan Indonesia menjadi negara maju dengan masyarakat yang sejahtera dalam sektor ekonomi dan kemanusiaan rupanya tidak berjalan berimbang dengan model kekuasaan yang dijalankan. Dengan militer sebagai pelindung dan alat pertahanan kekuasaan Orde Baru, Orde Baru mampu mengoptimalkan kekuasaannya di segala sektor kehidupan. Akan tetapi, dengan kekuasaan yang didukung dan diperkuat serta dilindungi oleh militer, rupanya Orde Baru dicitrakan sebagai pemerintahan yang represif dan otoriter.

Konsep *Security Approach* dengan keterlibatan dwifungsi militer mengunci dan menghalangi gerak para oposisi dari kalangan aktivis yang mencoba melakukan aksi protes dan perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru. Konsep tersebut membuat mereka merasa tidak aman dan selalu merasa diawasi meskipun mereka tidak melakukan suatu perlawanan. Konsep tersebut dapat dikatakan menjadi penguat kekuasaan Orde Baru dalam

menjalankan kekuasaan dan kepemimpinannya.

Wiji Thukul dalam Upaya Melawan Delegitimasi Kebenaran Orde Baru

Kecenderungan karya sastra dalam melihat realitas sosial yang terjadi merupakan kehendak dari setiap pengarang, seperti Wiji Thukul. Karya puisinya memiliki nilai dan mengandung semangat juang yang tinggi dalam menggugurkan kekuasaan Orde Baru yang sedang berlangsung. Melalui delegitimasi kebenaran yang disebarluaskan oleh Orde Baru, diharapkan dapat membuat pemerintahan Orde Baru goyah dan tumbang. Dari sini, dapat diidentifikasi hubungan antara aspek psikologis (kepekaan) dan wawasan pengarang dengan konteks sosial yang terjadi pada masa ia hidup, sehingga karya sastra yang ia ciptakan tidak hanya memprioritaskan keindahan belaka, melainkan efek dan kontrol sosial yang dapat berpengaruh pada perubahan tatanan dan keadaan sosial pada saat itu.

Dalam hal ini, selain memberikan sumbangsih pemikiran dalam teori-teori sosial, Foucault juga menggagas sebuah pemikiran tentang bahasa. Inti dari pemikirannya tentang bahasa adalah bagaimana bahasa dibangun dan digunakan untuk menciptakan sebuah kekuasaan. Foucault menyebut bahasa sebagai sistem gagasan yang saling berkaitan satu sama lain dan memberikan kita pengetahuan tentang dunia (Jones, 2009). Foucault juga menyebut bahasa tidak mengatakan dan menyatakan secara persis apa yang dikatakan (Wibowo, 2004). Baginya, bahasa adalah sarana dominasi (*formula of domination*), dimana bahasa memainkan perannya dalam menormalisasi penyimpangan fakta di luar bahasa, dan hal itulah yang ia sebut sebagai normalisasi bahasa (Liere, 2010).

Secara deskriptif, gaya bahasa Thukul merupakan gaya bahasa yang lugas dan cenderung memiliki daya arti yang eksplisit. Ia mencoba menyatakan dengan sebenarnya tentang sebuah realitas sosial di masa Orde Baru, sehingga aspek keindahan puisinya melalui sarana retorika tidak begitu diperhitungkan.

Berdasarkan pandangan Foucault tentang bahasa, gaya bahasa Thukul merupakan memiliki sebuah wacana dan dibangun oleh sebuah konteks. Pilihan diksi yang digunakan oleh Thukul menandakan bahwa ia ingin mengungkapkan dan menyatakan sebuah fakta tentang Orde Baru secara konkret, lugas, dan jelas. Seperti halnya dalam puisi *Sajak kepada Bung Dadi* yang menyatakan sebuah konteks tertentu, yaitu sebuah keadaan dimana rakyat kecil atau kaum marjinal menjadi asing di tanah airnya sendiri.

Ini tanah airmu
Di sini kita bukan turis

(“Sajak kepada Bung Dadi”, 31:12-13)

Kelugasan bahasa dan makna pada puisi di atas menandakan gaya bahasa khas seorang Thukul dalam merangkai gagasannya menjadi sebuah puisi. Dari puisi tersebut, dunia luar atau konteks tentang Orde Baru akan diketahui. Berdasarkan sejarahnya, prinsip developmentalisme yang diterapkan oleh Orde Baru menempatkan sektor ekonomi sebagai pusat dari pembangunan sebuah negara. Oleh sebab itu, Orde Baru membuat sebuah korporasi dengan pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga hal tersebut membuat pengusaha swasta dan petani menjadi tersingkirkan secara tidak langsung. Industrialisasi yang menjadi bukti bahwa Orde Baru menerapkan prinsip developmentalisme juga menempatkan rakyat

kecil khususnya petani berada dalam ketidakberdayaan. Orde Baru menggunakan cara yang represif untuk mengambil hak milik tanah para rakyat dengan dalih untuk kepentingan industri.

Perampasan hak milik tanah oleh Orde Baru terhadap masyarakat berujung pada sengketa dan perlawanan. Perampasan hak milik tanah tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani, akan tetapi juga terjadi di masyarakat perkotaan ataupun wilayah yang berdekatan dengan kota. Hal tersebut dapat dilihat dalam puisi Thukul yang berjudul *Nyanyian Akar Rumput* sebagaimana berikut.

Jalan raya dilebarkan
Kami terusir
Mendirikan kampung
Digusur
Kami pindah-pindah
Menempel di tembok-tembok
Dicabut
Terbuang
Kami rumput
Butuh tanah

(“Nyanyian Akar Rumput”, 25:1-10)

Puisi di atas menceritakan tentang potret kehidupan masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah pinggiran kota. Dari puisi tersebut, kepentingan kapitalisme negara dapat dilihat dan diketahui melalui ungkapan “jalan raya dilebarkan” dan “digusur”. Kedua ungkapan ini mewakili potret kehidupan masyarakat pinggiran kota yang sedang menghadapi relokasi dan pengusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk tujuan dan kepentingan ekonomi dan bisnis kapitalisme.

Ketika jalan raya dilebarkan dan tempat tinggal masyarakat pinggiran kota digusur, maka tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk

tinggal di emperan gedung atau bahkan membangun sebidak tempat diantara bangunan rumah-rumah. Potret tersebut merupakan dampak dari kapitalisme yang dianut oleh rezim Orde Baru pada saat itu. Para penguasa Orde Baru membangun relasi bisnis yang kuat dengan para pemodal asing untuk membangun ladang usaha meskipun pada akhirnya mengakibatkan keterpurukan bagi masyarakat pinggiran kota dan juga pedesaan.

Dari puisi di atas, pemahaman Foucault tentang bahasa lebih memihak pada konteks yang terkandung dalam gaya bahasa puisi Thukul. Pernyataan Foucault yang memandang bahwa bahasa tidak mengatakan dan tidak menyatakan secara persis apa yang dikatakan tidak dapat menjadi landasan dan acuan untuk meneliti gaya bahasa Thukul dalam puisi-puisinya, karena secara stilistik, gaya bahasa Thukul cenderung lugas, konkret, dan apa adanya. Akan tetapi, sumbangsih Foucault terhadap gaya bahasa puisi Thukul adalah bahasa sebagai sistem gagasan yang saling bertautan satu sama lain dan memberikan sebuah pemahaman dan gambaran tentang dunia yang disebut konteks.

Ciri gaya bahasa Thukul yang lugas, konkret, dan apa adanya memberikan sebuah petunjuk untuk memahami beberapa fakta sosial di masa pemerintahan Orde Baru. Kasus lain yang menjadi konteks dalam puisi Thukul adalah pernyataan presiden Soeharto yang meminta ABRI untuk mendukung Partai Golongan Karya (Golkar) dalam pemilu dan pernyataannya yang menyatakan bahwa siapapun yang mengkritik dirinya sebagai seorang presiden, maka ia juga telah mengkritik pancasila sebagai ideologi negara. Secara tidak langsung, Orde Baru menutup celah bagi setiap orang untuk mengeluarkan pendapatnya (Purnaweni, 2004). Hal tersebut

dapat dilihat dalam puisi *Aku Menuntut Perubahan*.

Seratus lubang kakus
Lebih berarti bagiku
Ketimbang mulut besarmu

(“Aku Menuntut Perubahan”, 74:1-3)

Istilah “mulut besar” merupakan sebuah kiasaan tentang perilaku dan perangai orang yang sombong dan angkuh. Thukul menyebutkan istilah “mulut besar” untuk menyatakan dan menggambarkan kepribadian Soeharto sebagai seorang presiden atau proklamator Orde Baru. Dalam sejarahnya, ketika presiden Soeharto menghadiri rapat pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang diselenggarakan di Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 1980, Soeharto mengatakan “Saya meminta ABRI mendukung Golkar dalam pemilihan umum”.

Kemudian, Soeharto menegaskan pernyataannya di depan para petinggi militer (Angkatan Darat) di markas Komando Pasukan Sandi Yudha pada tanggal 16 April 1980 dengan kalimat “*Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila*”. Berdasarkan kedua pernyataan itu, dapat diketahui kesewenangan Soeharto sebagai pemimpin negara dalam menjalankan roda kepemimpinan dan pemerintahannya dengan bebas. Maka, pemberian istilah “*mulut besar*” oleh Thukul kepada presiden Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru dapat dikatakan tepat dalam merepresentasikan dan merefleksikan kepribadian seorang pemimpin yang otoriter dalam diri presiden Soeharto.

Dengan demikian, gaya bahasa Thukul dalam sudut pandang Foucault mengandung sebuah konteks yang kuat yang dibangun atas mekanisme gagasan yang saling menguatkan. Gagasan tersebut dapat meliputi pandangan

Thukul tentang realitas sosial di masa Orde Baru yang menyangkut sifat otoriter Soeharto dan ketimpangan sosial yang terjadi, pribadi Thukul sebagai seorang seniman rakyat dan aktivis di masa Orde Baru, dan pengalaman hidup Thukul sebagai rakyat kecil, sehingga untuk menciptakan dan mengungkap sebuah konteks yang faktual tentang Orde Baru, Thukul tidak terlalu mempertimbangkan aspek-aspek retorika yang dapat mengaburkan esensi atau substansi dari puisi-puisinya.

Dari hal ini, dapat diketahui bahwa apa yang disebut bahasa oleh Foucault yang tidak menyatakan persis dengan apa yang dikatakan, bertentangan dengan gaya bahasa Thukul dalam puisinya. Peneliti hanya melihat satu konsep bahasa oleh Foucault yang dapat dijadikan landasan, yaitu bahasa digunakan untuk menyatakan suatu konteks dengan pertautan antara satu gagasan dengan gagasan lainnya melalui karya sastra, sehingga pengaplikasian pendekatan Sosiologi Sastra dalam penelitian ini dapat dikatakan tepat.

SIMPULAN

Orde Baru dikenal sebagai pemerintahan yang otoriter. Sentralisasi kekuasaan berpusat pada kekuatan Presiden, sehingga kebenaran yang dimunculkan dan disebarluaskan merupakan kebenaran tunggal yang tidak dapat dikritisi. Konsep *Security Approach* merupakan landasan berpijak sekaligus perlindungan pemerintah dari berbagai kecaman luar yang berasal dari para aktivis Orde Baru yang mencoba melakukan protes dan kritik atas ketimpangan sosial yang terjadi pada masa itu. Secara tidak langsung, pemerintah Orde Baru melibatkan ABRI sebagai bagian dari sistem *Security Approach* untuk melindungi dan menyelamatkan pemerintahan pada saat itu.

Sebagai sebuah manuskrip sejarah, puisi Wiji Thukul merupakan sebuah ijtihad

dirinya sebagai seorang seniman dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan protes terhadap ketimpangan dan diskriminasi yang dilakukan oleh para penguasa Orde Baru. Akibat dari puisinya, Wiji Thukul sempat dicari dan diburu, hingga pada akhirnya ditemukan dan disiksa oleh mekanisme kekuasaan opresif dan represif melalui aparat kepolisian dan aparat keamanan seperti ABRI.

Dari analisis yang telah dilakukan, peneliti menyatakan bahwa antologi puisi Wiji Thukul sarat akan saksi dan kejadian sejarah di masa Orde Baru. Puisi-puisinya merupakan warisan dan manuskrip sejarah yang juga sarat akan kebenaran dan lahir dari sebuah konteks sosial pada suatu masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dona, F. (2017). *Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah*. 2.
- Firdaus. (2017). Pembela Hak Asasi Manusia pada Isu Sumber Daya Alam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 8(2), 83–103.
- Gainau, A. W. (2017). *CRITICAL REVIEW DAN ANALISIS TEORI PEMBANGUNAN: Suatu Pemikiran Penelitian Tindakan Partisipatori Anisur Rahman*. 15(1), 22–31.
- Herdiansah, A. G., Ummah, C. K., Simanjuntak, S. (2017). Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 65–82.
- Jones, P. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme hingga Post-Modernisme* (Edisi Pert). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dona, F. (2017). *Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah*. 2.
- Firdaus. (2017). Pembela Hak Asasi Manusia pada Isu Sumber Daya Alam di Kabupaten Timor Tengah Selatan

- Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 8(2), 83–103.
- Gainau, A. W. (2017). *CRITICAL REVIEW DAN ANALISIS TEORI PEMBANGUNAN: Suatu Pemikiran Penelitian Tindakan Partisipatori Anisur Rahman*. 15(1), 22–31.
- Herdiansah, A. G., Ummah, C. K., Simanjuntak, S. (2017). Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 65–82.
- Jones, P. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme hingga Post-Modernisme* (Edisi Pert). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kebung, K. (2016). Michel Foucault: Intelektual Spesifik Versus Intelektual Universal. *DISKURSUS*, 15(2), 138–157.
- Leni, N. (2013). Keterlibatan Militer dalam Kacah Politik di Indonesia. *TAPIS*, 9(1), 31–45.
- Liere, L. van. (2010). *Memutus Rantai Kekerasan: Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi dan Terorisme*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Pradopo, R. D. (2007). *Pengkajian Puisi* (Edisi Kese). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 118–131.
- Sudibyo, A. (1998). De-Soekarnoisasi Dalam Wacana Resmi Orde Baru: KiLas-Balik Praktek-Praktek Rekeyasa Kebenaran dan Wacana Sejarah Oleh Rejim Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 1–25.
- Syahrie, S. P. (2009). *POLITIK PEMBANGUNAN ORDE BARU*: 6(1).
- Verendel, V. (2008). *A Prospect Theory approach to Security (Technical Report)*. Sweden: Department of Computer Science and Engineering.
- Wibowo, A. S. (2004). *Gaya Filsafat Nietzsche*. Yogyakarta: Galang Press.